



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMSE
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 727647

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	430.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.400 m2/224 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, WARISAN	Rp. 250.000.000	
2. Tanah Seluas 5.806 m2 di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI	Rp. 100.000.000	
3. Tanah Seluas 543 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI	Rp. 80.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	58.500.000
1. MOTOR, HONDA SM SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp. 3.500.000	
2. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp. 55.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.950.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	141.297.436
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	640.747.436
III. HUTANG	Rp.	37.650.928
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	603.096.508

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.